

## PRO KONTRA PENGUNDIAN NOMOR URUT PESERTA PEMILU 2024

1

Juniar Laraswanda Umagapi

### Abstrak

*Menuju Pemilu 2024, Indonesia telah berada dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Para penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memiliki tugas yang sangat berat untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang adil dan damai. Beberapa hari yang lalu muncul usulan untuk tidak melaksanakan pengundian nomor urut partai politik (parpol) dengan alasan penghematan anggaran parpol terutama alat peraga dan spanduk. Usulan ini memunculkan pro dan kontra di berbagai pihak. Tulisan ini membahas munculnya pro kontra pengundian nomor urut peserta Pemilu 2024 dan dampaknya. Dampak positif jika parpol tetap menggunakan nomor urut lama yaitu efisiensi anggaran terutama untuk atribut kampanye. Sedangkan dampak negatifnya yaitu parpol baru akan mendapatkan sisa nomor urut yang tidak digunakan parpol lama dengan nomor urut angka besar. Melalui fungsi pengawasan, komisi II DPR RI perlu terus mendorong penyelenggara pemilu agar tidak terjadi penundaan tahapan pemilu dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

### Pendahuluan

Saat ini tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sedang berlangsung, terutama menunggu partai politik (parpol) untuk mengumumkan siapa bakal calon Presiden untuk pemilu 2024. Tahapan penyelenggaraan pemilu saat ini telah sampai pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memasuki periode kesibukan dalam tahapan verifikasi. Dalam tahapan pendaftaran ini, isu siapa calon presiden yang diusung

partai dan koalisi siapa saja yang terbentuk juga menjadi topik hangat pembicaraan di media. Memasuki akhir tahun 2022 sudah mulai terlihat ramainya perpolitikan di Indonesia dengan banyaknya pertemuan politik dan momen para bakal calon presiden yang diisukan bertemu satu sama lain secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Sementara itu, muncul usulan tentang penggunaan nomor urut politik yang sama dengan pemilu sebelumnya. Jika benar usulan ini akan dilaksanakan, maka di



kemudian hari akan mengubah tahapan pelaksanaan pemilu yang sudah tercantum didalam undang-undang. Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengusulkan agar nomor urut Pemilu 2024 tak perlu diundi lagi dengan alasan untuk menghemat anggaran parpol (tempo.co, 22 September 2022). Usulan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena hadir saat tahapan penyelenggaraan sudah berlangsung dan menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Usulan ini juga akan mengubah peraturan pemilu yang sudah ditetapkan dari awal. Tulisan ini membahas munculnya pro kontra pengundian nomor urut peserta Pemilu 2024 dan dampaknya.

## Usulan Penghapusan Pengundian Nomor Urut

Terkait pengundian nomor urut parpol, dalam pasal 179 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, penetapan nomor urut parpol sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil parpol peserta pemilu. Lalu, Pasal 137 PKPU No. 4 Tahun 2022 menyebutkan, pada ayat (1) KPU melakukan pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka. Ayat (2) menyatakan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pengurus parpol peserta pemilu tingkat pusat dan Bawaslu. Pada ayat (3) berbunyi pengurus parpol peserta pemilu tingkat pusat wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut tersebut (beritasatu.com, 21 September 2022).

Sementara itu, munculnya usulan penghapusan pengundian nomor urut menimbulkan pro dan kontra. Ada kubu yang menerima usulan ini dan

kubu yang menolak secara tegas usulan ini dengan berbagai alasan masing-masing pihak. Nomor urut parpol pada Pemilu 2019 ingin dipakai lagi untuk Pemilu 2024. Bukan hal yang mudah untuk menghapus tahapan pengundian karena tahapan pemilu sudah berjalan. KPU sebagai penyelenggara pemilu dan DPR RI sebagai pembuat keputusan telah memutuskan tahapan pemilu untuk 2024 dan tidak ada perubahan dalam proses pengundian nomor urut partai. Meskipun usulan hanya untuk partai-partai lama, tetapi tentu saja usulan ini menghapus asas keadilan untuk semua peserta pemilu jika ada perbedaan tahapan untuk para pesertanya.

Usulan dari PDIP agar tetap menggunakan nomor urut partai yang sama dengan Pemilu 2019 adalah dikarenakan untuk menekan biaya. Usul ini juga disetujui oleh partai lainnya, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga sepakat dengan usulan tersebut bahwa hal itu bisa menghemat biaya kampanye. Dengan nomor parpol yang tidak berubah, peserta pemilu dapat memakai atribut kampanye dari pemilu sebelumnya seperti bendera yang merupakan atribut kampanye. Selain itu, pengundian nomor urut cukup diikuti partai politik yang baru mengikuti pemilu untuk nomor-nomor yang belum terpakai (Media Indonesia, 21 September 2022)

Mungkin jika melihat dari hal efisiensi tentu usulan ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Memang betul usulan ini bisa membantu partai-partai lama agar tetap menggunakan atribut mereka yang lama dan bisa menghemat anggaran partai politik tersebut. Apalagi untuk masyarakat golongan usia yang sudah berumur mereka condong mengingat partai

politik dengan nomor urut yang dipakai pada saat pemilu terakhir berlangsung.

Tetapi tentu tidak semua pihak akan menyetujui usulan ini, terutama partai-partai baru yang akan muncul pertama kali dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Mereka akan menilai ini sebagai bentuk ketidakadilan karena hanya akan mengutamakan partai-partai lama yang tetap ingin mempertahankan nomor urut mereka dan hanya memikirkan efisiensi anggaran partai lama itu sendiri.

Seperti partai-partai yang bakal mengawali debutnya dalam kontestasi, sehingga belum pernah memiliki nomor urut. Salah satunya, Partai Ummat yang mengkritik wacana soal penghapusan pengundian nomor urut. Menurut mereka, tidak ada hubungan antara mencetak alat peraga dengan nomor partai yang lama (2019) dengan penghematan biaya yang dikeluarkan oleh negara. (Kompas, 20 September 2022)

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyampaikan jika nomor urut partai politik pemilu 2019 tetap dipertahankan untuk Pemilu Serentak 2024, yang akan diuntungkan adalah partai tiga besar pemenang pemilu sebelumnya. Nomor urut parpol dalam pemilu bisa jadi alat untuk memudahkan partai mengenali dirinya ke rakyat. Terlebih, nomor urut kecil seperti 1-3 relatif jadi favorit dan dianggap nomor cantik lantaran punya keunggulan lebih mudah dikenali. (tribunnews.com, 19 September 2022)

Dalam menanggapi, komisioner KPU RI, Idham Holik menyatakan akan tetap berpegang pada ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 4 huruf b dan c berbunyi pengaturan

penyelenggaraan pemilu bertujuan mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Dengan demikian, pengundian nomor urut parpol tetap akan dilakukan. (Media Indonesia, 19 September 2022)

DPR RI melalui Komisi II yang bermitra kerja dengan KPU dan Bawaslu melakukan fungsi pengawasan dalam koridor Undang-Undang. DPR RI juga berperan untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar dan dipersiapkan dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal fungsi anggaran, DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Rp76,6 triliun. Adapun total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun (nasional.tempo.co, 4 Agustus 2022). Untuk itu, DPR RI akan selalu memastikan tahapan pelaksanaan pemilu akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada masalah anggaran meskipun banyak isu-isu kedepan yang akan muncul. Pengundian nomor urut ini juga tetap akan terlaksana karena besaran anggaran juga termasuk hitungan pelaksanaan pengundian di sidang pleno KPU yang terbuka.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut sebaiknya pihak KPU tegas dalam menentukan sikap. Bagaimanapun juga sudah memasuki tahapan pemilu dan tidak bisa mengubah suatu tahapan yang sudah disepakati diawal karena akan mengubah peraturan yang ada. Jika usulan ini dipertimbangkan tentu UU Pemilu juga harus ikut direvisi dan tidak mungkin bisa dilakukan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah

berjalan saat ini. Bukan hal yang mudah dan membutuhkan proses yang panjang untuk suatu undang-undang direvisi sedangkan Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi. Tidak menutup kemungkinan peserta pemilu juga akan ada parpol baru yang juga memiliki hak yang harus disamakan dengan parpol lainnya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting untuk menunjukkan tingkat demokrasi negara Indonesia.

Penyelenggara pemilu harus selalu amanah dan melakukan tugasnya dengan jujur dengan berpedoman pada UU Pemilu. Segala tahapan pemilu serta persyaratan tahapan semua sudah dijelaskan dalam undang-undang. Peserta pemilu haruslah mengikuti semua aturan yang ada dan penyelenggara pemilu dituntut bersikap profesional dan tidak diskriminatif terhadap calon peserta pemilu. Penyelenggara pemilu juga harus tegas dalam menentukan sikap terkait tahapan Pemilu 2024.

### **Dampak Nomor Urut Partai Politik**

Jika dilihat lagi sebenarnya tidak ada dampak yang sangat besar akan nomor urut parpol, karena poin utama untuk memperkenalkan partai politik dan mendapatkan suara adalah kerja keras kampanye parpol dan calon itu sendiri. Meskipun demikian, adanya asumsi soal keberuntungan mendapatkan angka kecil dalam nomor urut pemilu merupakan suatu hal yang wajar. Namun, tidak menutup kemungkinan jika parpol mendapatkan angka besar bisa saja menang. Itu bisa terjadi karena memang pemilih sudah tertarik dengan hasil kinerja partai tersebut.

Masih ada pandangan akan lebih baik jika mendapatkan nomor urut awal atau nomor kecil agar mudah diingat masyarakat terutama jika jumlah

partai politik yang lolos sangat banyak. Pandangan lain, lebih gampang memiliki nomor urut yang sama agar masyarakat tetap mengingat partai politik dengan nomor urut tersebut. Tetapi tentu pendapat ini belum sepenuhnya terbukti, jika masyarakat memang ingin memilih parpol tersebut dan setuju dengan visi misi parpol mereka akan dengan sendirinya mengingat nomor urut parpol tersebut. Memang benar ada sedikit ingatan akan nomor urut dari pemilu sebelumnya tetapi jika parpol berhasil melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan nomor urut baru mereka maka tidak ada masalah besar.

Terlalu banyak kontra yang terjadi jika pengundian nomor urut hanya dilakukan oleh partai-partai baru karena akan dianggap tidak memberikan kesempatan untuk memiliki nomor urut yang dikehendaki. Sedangkan partai lama sudah memiliki nomor urut yang melekat kepada mereka. Padahal yang biasanya terjadi di lapangan, setelah nomor urut selesai diundi berbagai parpol akan menemukan makna tersendiri dibalik nomor urut yang mereka dapati sesuai keinginan masing-masing partai. Isu ini sudah sangat mencuat karena sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun yang mana penetapan parpol peserta pemilu termasuk pengundian dan penetapan nomor urut parpol akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022.

Jika permasalahan karena ketakutan parpol lama akan nomor urut baru maka proses tahapan kampanye yang harus digencarkan karena tahapan ini adalah momen sosialisasi peserta pemilu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan suara. Permasalahan jika pengundian nomor urut parpol tidak dilakukan, maka akan bertentangan UU Pemilu khususnya Pasal 179 yang mengamanatkan untuk

dilakukannya pengundian nomor urut peserta pemilu secara terbuka.

Dampak nomor urut terhadap jumlah suara juga tidak terbukti akan berdampak sangat besar karena poin utama adalah proses kampanye partai politik tersebut. Peran parpol sangat penting dalam menentukan jalannya demokrasi suatu negara. Sebaiknya parpol menunjukkan visi dan misi untuk menjadi jembatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimulai dengan mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan tanpa adanya kekurangan agar menjadikan contoh yang baik kepada masyarakat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk dipilih dalam pemilu.

### Penutup

Perbedaan pendapat mengenai perlu ada atau tidaknya pengundian nomor urut ini menimbulkan pro dan kontra. Dampak positif jika parpol tetap menggunakan nomor urut lama adalah efisiensi anggaran terutama untuk atribut, poster partai politik karena masih bisa menggunakan atribut lama. Sedangkan, dampak negatif tetap menggunakan nomor urut lama adalah parpol baru akan mendapatkan sisa nomor urut yang tidak digunakan partai lama dan nomor urut tersebut adalah nomor urut dengan angka besar atau bisa dikatakan nomor urut dua digit.

Komisi II DPR RI harus selalu memastikan jalannya tahapan pemilu berjalan sesuai rencana. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II perlu mendorong pemerintah agar tidak terjadi penundaan tahapan pemilu terutama juga dalam masalah anggaran. Prioritas utama yaitu memastikan KPU dan Bawaslu bisa menyiapkan segala keperluan pemilu

tanpa ada kendala dan berjalan sesuai dengan yang dianggarkan. Bagi parpol penting untuk tetap solid dalam mempersiapkan tahapan pemilu baik di internal ataupun eksternal parpol.

### Referensi

“DPR: Anggaran Pemilu 2024 Harus Jadi Prioritas dari Segala Prioritas”

Tempo 4 Agustus 2022 <https://nasional.tempo.co/read/1619203/dpr-anggaran-pemilu-2024-harus-jadi-prioritas-dari-segala-prioritas> diakses 24 September 2022

“Jika Nomor Urut Parpol Dipertahankan, 3 Besar Partai Pemenang Pemilu 2019 Lebih Diuntungkan”. *Tribunnews.com* 19 September 2022 <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/19/jika-nomor-urut-parpol-dipertahankan-3-besar-partai-pemenang-pemilu-2019-lebih-diuntungkan> diakses 24 September 2022 diakses 23 September 2022

“Ketika Pengundian Nomor Urut Parpol Terancam Lenyap pada 2024” *Kompas*, 20 September 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/06082591/ketika-pengundian-nomor-urut-parpol-terancam-lenyap-pada-2024> diakses 22 September 2022

“KPU Tegaskan Nomor Urut Parpol pemilu 2024 Tetap Diundi” *beritasatu.com*, 21 September 2022 <https://www.beritasatu.com/news/979435/kpu-tegaskan-nomor-urut-parpol-pemilu-2024-tetap-diundi> diakses 28 September 2022.

“Megawati Usul No Parpol Tetap, KPU Bergeming”. *Media Indonesia*. 19 September 2022, hal. 5

“PKB Dukung PDIP soal Nomor Parpol”. *Media Indonesia*. 21 September 2022, hal. 3

“Soal Nomor Urut Parpol di Pemilu 2024, Peneliti BRIN: Perlu Ditata Ulang” *tempo.co*, 22 September 2022 <https://nasional.tempo.co/read/1637094/soal-nomor-urut-parpol-di-pemilu-2024-peneliti-brin-perlu-ditata-ulang> diakses 28 September 2022.



Juniar Laraswanda Umagapi  
*juniar.umagapi@dpr.go.id*

Juniar Laraswanda Umagapi S.IP.,M.A lahir di Tidore, 13 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Economics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.